

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota dengan segala macam aktivitasnya menawarkan berbagai ragam potensi, peluang dan keuntungan dalam segala hal. Kota juga menyediakan lebih banyak ide dan solusi bagi orang-orang yang kreatif untuk dapat memperbaiki kehidupannya. Kehidupan di kota menggambarkan kehidupan kerja yang terorganisir, banyaknya pilihan kerja, dan pengembangan diri lebih terbuka serta bervariasi. Kota pun dianggap sebagai pusat pelayanan dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya. Hal tersebut memunculkan adanya daya tarik tersendiri bagi kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan atau luar kota. Migrasi atau urbanisasi pun dipilih sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki kehidupan. Akibatnya jumlah penduduk di kota semakin lama semakin menunjukkan angka yang besar.

Selain banyak menyimpan kemenarikan kota juga menyodorkan berbagai masalah. Perkembangan jumlah penduduk di kota yang semakin tak terkendali ditambah luas lahan yang tersedia sangat sempit tidak diimbangi dengan daya dukung kota itu sendiri, untuk menyediakan kebutuhan rumah hunian dan sarana serta prasarana kota. Perpindahan penduduk (migrasi) akan menimbulkan lapisan sosial baru yang juga dapat menjadi beban kota, karena kebanyakan dari kaum migran tersebut tidak berhasil hidup dengan layak di kota. Besar kemungkinan masalah tersebut akan menimbulkan masalah baru

yaitu kemiskinan penduduk kota, permukiman yang padat dan kumuh, banyaknya sektor informal dan pencemaran yang diakibatkan oleh industri.

Kondisi tersebut rupanya terus berkembang, ditambah pula oleh cepatnya pertumbuhan penduduk kota. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Hamudy (2008: 2), yaitu :

Keadaan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat serta tidak diimbangi dengan pembangunan permukiman dan jumlah rumah yang layak huni, menyebabkan banyak tumbuhnya permukiman kumuh atau kawasan kumuh, baik ditinjau dari kualitas lingkungan, kualitas tata ruang, maupun kualitas manusia penghuninya.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh sendiri selalu berkaitan dengan kemiskinan, di mana biasanya bila ada permukiman kumuh berarti di dalamnya ada kemiskinan.

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di negara berkembang termasuk Indonesia. Saat ini sekitar satu milyar orang atau sepertiga penduduk dunia tinggal di permukiman kumuh. Menurut Widjanarko (2008: 1) “saat ini terdapat 17 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan berada dibawah garis kemiskinan yang menempati permukiman kumuh di area seluas 40.000 hektar di 10.000 lokasi”. Dalam Rapat Kerja Nasional NUSSP (2007) menghasilkan keputusan :

Pemerintah Indonesia tahun 2007 mengalokasikan dana sebesar Rp165 miliar yang berasal dari APBN dan APBD untuk penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSSP). Dana tersebut akan digunakan di 397 Kelurahan/Desa di seluruh Indonesia dengan luasan wilayah kumuh yang akan ditangani 3.960 hektar.

Hal itu berarti bahwa persoalan permukiman kumuh memang telah lama dialami pula oleh Negara Indonesia, dan pemerintah pun telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Sejalan dengan itu Marwati (2004: 1) menyebutkan bahwa “kehadiran permukiman kumuh pada dasarnya sebagai akibat migrasi atau urbanisasi, pertumbuhan penduduk yang melebihi kapasitas lahan dan jumlah fasilitas, serta perkembangan permukiman di perkotaan tanpa adanya perencanaan tata ruang kota yang menyeluruh”.

Menurut Sueca (2004: 2) “munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan satu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada produksi rumah langsung terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah keatas, dan prioritas program perumahan pada rumah milik dan mengabaikan potensi rumah sewa”.

Sejalan dengan perkembangan waktu, persoalan permukiman kumuh akan semakin kompleks, baik dilihat dari sudut sosial, ekonomi, maupun lingkungan fisik, seperti kenyamanan hidup, kesehatan, keamanan, dan kesempurnaan hidup. Padahal dalam makna yang lebih luas, permukiman harus mampu membuka jalan dan memberikan wahana bagi kebutuhan, aspirasi, dan keinginan manusia secara penuh, menuju perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan manusia.

Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami masalah permukiman kumuh, terlebih lagi beberapa tahun kebelakang arus migrasi ke Kota Bandung sangat tinggi, dan tidak diimbangi dengan daya dukung dari Kota Bandung sendiri untuk menyediakan lahan perumahan dan permukiman. Pemerintah Kota Bandung menyebutkan :

Wilayah Kota Bandung seluas 16.729,65 Ha dengan penduduk 2.329.938 jiwa (Tahun 2007) atau rata-rata 146 jiwa/Ha, menjadikan Bandung berada di peringkat 38 dari 140 kota di Asia dalam urutan kualitas kota. Jika 1 unit rumah dihuni rata-rata 5 jiwa, Kota Bandung membutuhkan tidak kurang 500.000 unit. Sementara yang sudah ada saat ini baru mencapai 387 ribu unit, kekurangan 113 ribu unit yang merupakan kebutuhan mendesak (www.bandung.go.id).

Sejalan dengan pendapat di atas kebutuhan akan rumah hunian yang layak di Kota Bandung menjadi kebutuhan mendesak, karena efek dari hal tersebut adalah munculnya kawasan yang menjadi permukiman kumuh dan kondisinya semakin hari semakin tidak terkendali.

Masalah permukiman kumuh di Kota Bandung sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melakukan berbagai langkah terhadap permukiman kumuh, antara lain Program Perbaikan Kampung (KIP) pada tahun 1978, ada pula yang ditata dan dibangun kembali menjadi rumah susun. Pemerintah juga pernah merangsang masyarakat untuk memperbaikinya sendiri, tetapi ada juga yang cenderung dibiarkan. Pada tahun 1998 dalam rangka proyek penataan permukiman kumuh, telah dilakukan kajian untuk mengklasifikasi kampung kumuh di Kota Bandung. Jika melihat sebaran kawasan kumuh di Kota Bandung mulai menampakkan perambahan di pinggiran kota yang dahulunya sebagai lokasi perluasan kota, hal ini dapat dimaklumi karena kecamatan-kecamatan di Bandung lama sudah sangat jenuh.

Dalam pikiran rakyat September 2007 Departemen Pekerjaan Umum menargetkan pada tahun 2020 mendatang semua kota di Indonesia akan terbebas dari kawasan kumuh. Hal itu sejalan dengan Program MDGs (Milenium Development Goals) pada 2015 ditargetkan 50 persen kota di Indonesia bebas kawasan kumuh, termasuk Kota Bandung.

Tabel 1.1 Sepuluh Kecamatan Terpadat di Kota Bandung

Kecamatan	Kepadatan penduduk	Kecamatan	Kepadatan penduduk
Bojongloa Kaler	392 jiwa/ha	Cibeunying Kidul	209 jiwa/ha
Andir	280 jiwa/ha	Kiara Condong	208 jiwa/ha
Astanaanyar	244 jiwa/ha	Regol	194 jiwa/ha
Batununggal	243 jiwa/ha	Bandung Kulon	193 jiwa/ha
Sukajadi	233 jiwa/ha	Babakan Ciparay	184 jiwa/ha

Sumber : Bandung Dalam Angka 2007, BPS Kota Bandung

Kota Bandung, dalam 10 tahun mendatang masyarakatnya diprediksi akan sulit mendapatkan rumah. Saat ini saja, sekitar 146 jiwa mendiami tiap hektare. Padahal, menurut standar WHO, idealnya hanya 96 jiwa di setiap hektare (Pikiran Rakyat, 19 Januari 2009). Dominasi kaum miskin di perkotaan menciptakan banyak kendala bagi penyediaan rumah di perkotaan. Penyediaan lahan untuk mendirikan rumah yang layak dan terjangkau, menjadi hal yang sulit diwujudkan. Belum lagi kemampuan masyarakat atas kepemilikan rumah yang semakin hari harganya semakin tinggi dan tak terjangkau. Berdasarkan data dari BAPPEDA Kota Bandung, dari 139 Kelurahan yang ada di Kota Bandung, kelurahan yang dikategorikan kumuh mencapai 122 Kelurahan, itu berarti hanya 17 Kelurahan saja yang dikategorikan sebagai kelurahan tidak kumuh.

Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung, yang sebagian permukiman berkarakteristik seperti permukiman kumuh. Berdasarkan data BPS Kota Bandung Tahun 2007 kepadatan penduduk di Kecamatan Bojongloa Kaler mencapai 39.240 Jiwa/Km² atau setara dengan 392 Jiwa/ha.

Menurut data dari BAPPEDA Kota Bandung, semua kelurahan yang ada di Bojongloa Kaler masuk dalam permukiman kumuh. Selain itu Kelurahan Jamika yang merupakan kelurahan terpadat di Kota Bandung menjadi salah satu lokasi dari delapan kelurahan yang rencananya akan dibangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang merupakan program pemerintah Kota Bandung Tahun 2008-2009 dalam menangani masalah permukiman kumuh (www.bandung.go.id).

Tabel 1.2 Data Permukiman Kumuh Kecamatan Bojongloa Kaler

Kelurahan	Jumlah Lokasi	Jumlah Rumah Kumuh	Jumlah Keluarga
Kopo	14	374	422
Suka asih	4	350	420
Babakan asih	4	160	180
Babakan tarogong	7	735	830
Jamika	3	600	740
TOTAL	32	2,219	2,592

Sumber : Statistik Pekerjaan Umum 2005, www.pu.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, menarik rasanya diadakan penelitian tentang bagaimana sebenarnya karakteristik permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler saat ini baik dari kondisi fisik dan sosial ekonomi, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kekumuhan yang terjadi dan aspek apa yang paling

berperan terhadap kekumuhan tersebut. Judul pada penelitian ini yaitu Studi Tentang Permukiman Kumuh di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di Kota Bandung yang makin tinggi, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman yang layak huni dan terjangkau belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada menurun dan pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya permukiman kumuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi tingkat kekumuhan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal dan kecenderungan memandang kehidupan masa depan?
4. Bagaimana pengaruh jumlah migran terhadap indeks kekumuhan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi tingkat kekumuhan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
3. Mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal dan kecenderungan memandang kehidupan masa depan.
4. Mengetahui besaran pengaruh jumlah migran terhadap indeks kekumuhan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kekumuhan permukiman di Bojongloa Kaler Kota Bandung.
2. Memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kekumuhan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
3. Memperoleh gambaran mengenai tanggapan masyarakat mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal dan kecenderungan memandang kehidupan masa depan.
4. Memperoleh informasi mengenai pengaruh jumlah migran terhadap indeks kekumuhan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

F. Definisi Operasional

1. Permukiman Kumuh.

Berdasarkan publikasi World Bank Tahun 1999 (dalam Kirmanto, 2001 : 1) permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan di mana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang ditunjukkan dari kondisi sosial demografis seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya.

2. Tingkat kekumuhan.

Menurut Dirjen Perumahan dan Permukiman (2002) tingkat kekumuhan adalah ukuran kekumuhan suatu kawasan kumuh dibandingkan dengan kawasan lainnya. Nilai dari tingkat kekumuhan di dapat dari indikator kekumuhan, yang meliputi kondisi fisik dan sosial ekonomi permukiman dan dengan menggunakan rumus :

$$TK = \sum (nk \times \text{bobot})$$

(Dirjen Perumahan dan Pemukiman 2002)

Keterangan :

TK : Tingkat Kekumuhan.

Nk : Nilai kekumuhan (diperoleh dari nilai masing-masing indikator).

Bobot : Persen untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

3. Faktor yang mempengaruhi kekumuhan

Faktor yang mempengaruhi kekumuhan disini adalah hal-hal yang ikut menyebabkan kekumuhan terjadi.

4. Tanggapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, komentar, kritikan, gejala, keadaan atau sesuatu apa yang diterima panca indra, atau juga bayangan dari anggapan. Sedangkan tanggapan masyarakat di sini adalah tanggapan masyarakat yang bermukim di permukiman kumuh Kecamatan Bojongloa Kaler mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal dan kecenderungan memandang kehidupan masa depan.

5. Migrasi

Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1970 (dalam Zoebir, 2008 :2) merumuskan pengertian dari migrasi penduduk yaitu sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari satu unit administrasi ke unit administrasi yang lain. Dalam penelitian ini jumlah migran menjadi salah satu objek yang diteliti. Migran sendiri adalah pelaku dari migrasi.

6. Studi tentang permukiman kumuh di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

adalah kajian mengenai segala sesuatu yang menyangkut permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Namun, dalam penelitian ini kajiannya hanya meliputi tingkat kekumuhan, faktor yang mempengaruhi kekumuhan, tanggapan masyarakat mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal dan kecenderungan memandang kehidupan masa depan, serta pengaruh jumlah migran terhadap indeks kekumuhan.